

**PENYEBAB MUNCULNYA BEBAN BIAYA PADA  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA**

**(Skripsi)**

**Oleh  
FIRMAN AMIN ROSYIDIN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRACT

### CAUSES OF APPEARANCE ON COST RECIPIENTS OF RASTRA OF THE RICE SOCIAL ASSISTANCE

By  
Firman Amin Rosyidin

This study aims to determine the cause of the emergence of cost burdens in the Recipients Of Rastra (KPM) of The Rice Social Assistance (Bansos Rastra) in Sidorejo Village, Sekampung Udik District, East Lampung Regency. This study uses descriptive qualitative methods by conducting interviews with five informants, including three distribution officers and two Recipients Of Rastra (KPM). The results of this study indicate that the cause of the emergence of cost burdens for the Keluarga Penerima Manfaat (KPM) of the Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) is, there is no budget in the distribution process at the Point Share (TB) of the Recipients Of Rastra (KPM) and there was no response from the village government to the problem. So that in the distribution process raises economic pressure on distribution officers what is meant here is the Chairperson as well as the Responsible Program at the Point Share (TB), Head of the Hamlet and Chair of the Rt. To avoid these economic pressures, a cost burden must be borne by KPM to replace coolies and distribution costs. Then the fees charged by distribution officers are a rational choice in order to avoid losses, if this is not done then it can have an impact on the process of running the program. This problem must be resolved immediately Because Social Assistance is assistance from the government or from any party that is given to the community free of charge or free of charge without a penny to get it. Service to the community properly and correctly on the basis of existing rules is the responsibility of the highest and lowest levels of government, the service is solely for community satisfaction.

Keywords: Appearance On Cost, Recipients Of Rastra (KPM), The Rice Social Assistance.

## **ABSTRAK**

### **PENYEBAB MUNCULNYA BEBAN BIAYA PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA**

**Oleh  
Firman Amin Rosyidin**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab munculnya beban biaya pada Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara kepada lima informan, diantaranya tiga petugas pendistribusi dan dua Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab munculnya beban biaya pada Bansos Rastra yakni, tidak adanya anggaran dalam proses distribusi di Titik Bagi (TB) ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari pemerintah kabupaten dan tidak ada respon dari pemerintah desa terhadap masalah yang ada. Dengan adanya masalah tersebut, menimbulkan tekanan ekonomi pada petugas distribusi, yang dimaksud disini adalah Ketua Pelaksana sekaligus Penanggung Jawab Program di Titik Bagi (TB), Kepala Dusun dan Ketua Rt. Untuk menghindari tekanan ekonomi tersebut maka muncul lah beban biaya yang harus ditanggung oleh KPM guna mengganti ongkos kuli dan ongkos distribusi. Maka pembebanan biaya yang dilakukan petugas distribusi adalah suatu pilihan rasional guna menghindari kerugian, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dapat berdampak pada proses berjalannya program tersebut. Permasalahan ini harus segera diselesaikan karena Bantuan Sosial adalah bantuan dari pemerintah atau dari pihak manapun yang diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma atau bersifat gratis tanpa adanya biaya sepeserpun untuk mendapatkannya.

Kata kunci: Beban biaya, Keluarga Penerima Manfaat, Bansos Rastra.

**PENYEBAB MUNCULNYA BEBAN BIAYA PADA  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA**

Oleh  
**Firman Amin Rosyidin**

**Skripsi**  
**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**  
**SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada**

**Jurusan Sosiologi**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**BANDAR LAMPUNG**  
**2019**

Judul Skripsi : **PENYEBAB MUNCULNYA BEBAN  
BIAYA PADA KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN SOSIAL BERAS  
SEJAHTERA**

Nama Mahasiswa : ***Firman Amin Rosyidin***

Nomor Pokok Mahasiswa : 1516011052

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1 **Komisi Pembimbing**

**Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.**  
NIP. 19850530 200812 1 002

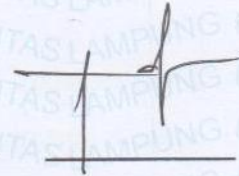
2 **Ketua Jurusan Sosiologi**

**Drs. Ikram, M.Si.**  
NIP. 19610602 198902 1 001

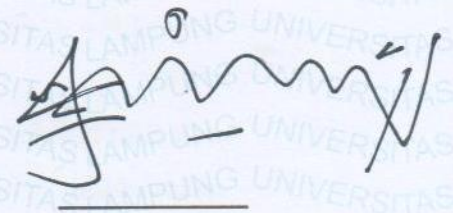
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Drs. Pairulsyah, M.H.**



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Mei 2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 20 April 2019

Saya membuat pernyataan,



*Amin Rosyidin*  
Amin Rosyidin  
NPM 1516011052

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Firman Amin Rosyidin dilahirkan di Lampung Timur pada tanggal 27 Agustus 1997. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Mursyid Rifai dan Ibu Umi Salamah (Almh). Penulis memiliki satu adik perempuan.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu :

1. MI Bustanul Ulum Sidorejo, diselesaikan pada tahun 2009
2. MTS Maarif 14 Sidorejo, diselesaikan pada tahun 2012
3. SMA N 1 Sekampung Udik, diselesaikan pada tahun 2015

Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Pada Januari 2018 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.



## **MOTTO**

**"Qulil Haqqa Walau Kana Murrn"  
Katakan kebenaran walaupun itu pahit rasanya  
(Imam Syafi'i)**

**"apa yang bisa kita lakukan atas apa yang kita miliki untuk  
mendapatkan apa yang kita butuhkan"  
(Anonim)**

**Berangkat dari desa pergi ke kota untuk mencari ilmu dan pulang  
ke desa untuk mengabdikan kepada masyarakat berbagi ilmu niatkan  
ibadah insyaallah masalah dunia akhirat  
(Firman Amin Rosyidin)**

**Aset terbesar desa adalah orang-orang yang mempunyai  
kesempatan untuk menimba ilmu di kota, jadi sudah selayaknya  
mereka kembali untuk membangun desa  
(Firman Amin Rosyidin)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT,  
karya ini saya persembahkan kepada orang yang saya cinta, sayangi dan bermakna  
dalam hidup saya.

Kedua orang tuaku yang sangat kucintai, kusayangi dan kubanggakan,  
Ibuku Umi Salamah (Almh) di surga dan Bapakku Mursyid Rifai terima kasih  
telah menjadi kedua orang tua yang sempurna bagiku dan terima kasih pula  
kepada Bibi ku Usriwati, Adik ku Fitri dan juga teman hidup seperjuangan  
Marinda semoga kalian semua selalu diberi panjang umur amin. Terima kasih  
telah memberikan dukungan dan perhatian dengan penuh kasih sayang, terima  
kasih telah menjadi sosok orang tua dan keluarga yang tegas serta humoris yang  
selalu memberikan canda dan tawa, terima kasih selalu menyebut namaku dalam  
setiap doa, terima kasih pula atas motivasi kalian sehingga aku dapat  
menyelesaikan karya ini. Kalian lah orang yang sangat berarti dalam hidupku.  
Maaf baru karya ini yang dapat kupersembahkan untuk kalian.

Teman-teman yang selalu memberi semangat, hiburan, dukungan serta doa,  
kuucapkan terimakasih kepadanya.

Untuk keluarga besarku yang selalu menanyakan kapan ujian skripsi dan kapan  
wisuda, semua sudah terjawab dengan dicetaknya karyaku ini. Terima kasih atas  
pertanyaan kalian yang tentunya membangkitkan semangatku untuk  
menyelesaikan karya ini dan ini semua tak terlepas atas bantuan doa yang kalian  
berikan kepadaku.

Keluarga besar Mahasiswa Sosiologi 2015  
Almamater tercinta  
Universitas Lampung, Khususnya Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda alam Nabi Besar Muhammad SAW yang kita semua nantikan syafa'atnya di yaumul akhir kelar Aamiin. Skripsi dengan judul **“PENYEBAB MUNCULNYA BEBAN BIAYA PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA”** ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Penguasa Alam Semesta, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi panutan serta suritauladan yang baik.
2. Ucapan terima kasih kepada keluarga ku terutama kedua orang tua ku Mamak di surganya Allah dan Bapak yang hebat selalu nurutin kemauan anaknya terima kasih kalian sudah menjadi orang tua yang selalu mendukung dalam hal apapun. Bibik yang sudah merawat dan membesarkanku hingga sekarang terima kasih atas doa dan dukungan kalian.

3. Terima kasih untuk keluarga Bapak H. Marmono dan Ibu Hj. Sri, telah memberikan banyak kemudahan dan dukungan selama ini, semoga saya dapat membalasnya kelak dikemudian hari.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Ikram, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. I Gede Sidemen, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik selama masa perkuliahan saya.
7. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos, M.Krim., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas kesabaran dalam proses bimbingan dan meluangkan waktu yang bapak berikan kepada saya serta mengarahkan dalam penulisan skripsi saya dan nasehat yang bapak berikan kepada saya terima kasih. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dan tetap menjadi dosen terbaik di Sosiologi.
8. Bapak Drs. Pairulsyah M.H, selaku dosen penguji, terima kasih atas kritik dan saran yang telah bapak berikan dan tentunya semua itu bertujuan untuk menyempurnaan skripsi ini. Sehat, panjang umur dan tetap menjadi dosen yang ramah untuk adik-adiknya.
9. Seluruh dosen Jurusan Sosiologi yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.
10. Untuk MbK Vivi, MbK Lina, dan Mas Riski terima kasih sudah menjadi staf yang baik dan ramah di sosiologi.

11. Untuk teman-teman squad PUBG Slayer Of Sins (SOS), Wahyu, Naufal, Roki, Riski du, Gusri dan masih banyak lagi, terima kasih telah menjadi pengobat jenuh dalam proses penyusunan skripsi, semoga kita tetap menjadi tim yang solid dan terus menjalin silaturahmi.
12. Seluruh teman-teman Sosiologi 2015 terima kasih atas keseruannya selama masa perkuliahan ini.
13. Teman-teman alumni SMA N 1 Sekampung Udik, khususnya mie aceh squad, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berkumpul dan saling menghibur, semoga kita tetap menjadi keluarga yang solid.
14. Teman-teman KKN Desa Panaragan, Terima kasih atas support selama proses ber KKN, semoga kita menjadi manusia yang sukses dan bermanfaat untuk orang lain.
15. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama saya menimba ilmu di Universitas Lampung.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat.

Bandar Lampung, 20 April 2019  
Penulis,

**Firman Amin Rosyidin**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>SANWACANA .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kemiskinan .....	11
B. Program Penanggulangan Kemiskinan .....	16
C. Bantuan Sosial Beras Sejahtera .....	20
D. Penerima Manfaat Bansos Rastra .....	23
E. Landasan Teori Penelitian.....	24
F. Kerangka Pikir .....	26
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Penentuan Informan .....	31
E. Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Kriteria dan Taknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	41
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Sejarah Singkat Desa Sidorejo.....	43
B. Kondisi Geografis Desa Sidorejo.....	45

C. Struktur Pemerintahan Desa Sidorejo .....	47
D. Peta Desa Sidorejo .....	48
E. Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra .....	49
F. Kaitan Desa Sidorejo dengan Permasalahan Pungutan Liar pada Bansos Rastra .....	58
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Identitas Informan .....	61
B. Hasil Penelitian .....	65
A. Penyebab Munculnya Beban Biaya yang Harus Ditanggung oleh KPM Bansos Rastra .....	65
B. Reaksi Masyarakat .....	67
C. Alur Pemungutan Biaya .....	68
D. Tekanan Ekonomi dan Pungutan Liar Sebagai Pilihan Rasional..	69
C. Pembahasan.....	71
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

## LAMPIRAN

- Lampiran 1. Panduan Wawancara
- Lampiran 2. Transkrip Wawancara
- Lampiran 3. Catatan Lapangan
- Lampiran 4. Daftar Keluarga Penerima Manfaat

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin Berdasarkan Daerah September 2016 – September 2017 .....	13
2. Data Daftar Komoditi yang Memberikan Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), September 2018.....	14
3. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun 1 .....	49
4. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun 2 .....	51
5. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun 3 .....	52
6. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun 4 .....	53
7. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun 5 .....	54
8. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun 6 .....	55
9. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun 7 .....	56
10. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun 8 .....	56
11. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun 9 .....	57
12. Ringkasan Hasil Penelitian Penyebab Terjadinya Pungli Bansos Rastra.....	75
13. Ringkasan reaksi KPM terhadap pungutan .....	75



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Persentasi tingkat Kemiskinan 1999-September 2017.....	12
2. Kerangka Pikir .....	28
3. Struktur Pemerintahan Desa Sidorejo .....	47
4. Peta Desa Sidorejo .....	48
5. Peta Desa Sidorejo .....	48

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan dan kekurangan pangan secara global telah menurun pada dua dekade terakhir secara signifikan, usaha negara-negara dunia melalui *PBB* merumuskan *Millenium Development Goals (MDGs)* sebagai solusi mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dan menetapkan permasalahan kemiskinan dan kekurangan pangan sebagai permasalahan pertama untuk diselesaikan. Usaha mengatasi permasalahan kemiskinan dan kekurangan pangan melalui *MDGs* yang dialami oleh negara di dunia tercapai pada lima tahun sebelum batas waktu program tersebut usai pada tahun 2015. *Inter-Agency and Expert Group on Indikator MDG (2015)* melaporkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan di dunia sampai 12 persen pada tahun 2015, Tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang menjadi 14 persen pada tahun 2015, turun dua pertiga dari tahun 1990 yang mencapai 47 persen. Pada tahun 2011, seluruh negara berkembang kecuali negara di Afrika telah menemukan cara untuk mengurangi proporsi penduduk miskin yang ada di negaranya demi tercapainya target yang telah ditetapkan dalam *MDGs*. Untuk konteks ini, negara dengan penduduk terpadat di dunia seperti China dan India mempunyai peran sentral terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di dunia.

Menurut hasil *The Millenium Development Goals Report (Inter-Agency and Expert Group on Indikator MDG, 2015)*. Kemiskinan di Asia Timur telah menurun menjadi 4 persen pada 2015 dari 61 persen pada tahun 1990 dan di negara Asia Selatan, kemiskinan turun dari 52 persen menjadi 17 persen untuk periode yang sama. Sebaliknya, di Asia Barat kemiskinan diperkirakan meningkat pada tahun 2011 sampai 2015 dan benua Afrika tidak terjadi penurunan kemiskinan yang signifikan pada rentan waktu 1990 sampai tahun 2002. Meskipun percepatan penurunan kemiskinan telah dilakukan pada dekade terakhir, wilayah ini tetap tertinggal. Pada tahun 2015 lebih dari 40 persen penduduk di benua Afrika berada pada garis kemiskinan. Salah satu target *MDGs* dalam penanggulangan kemiskinan dan kekurangan pangan di benua Afrika masih belum tercapai, hampir 23 persen masyarakat mengalami gizi buruk menandakan tingkat kelaparan yang dialami masih tinggi.

Problematika kemiskinan dan kekurangan pangan merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Berdasarkan Profil Kemiskinan di Indonesia September 2017 (BPS, 2018) menyatakan, pada periode 1999 - September 2017 secara umum kemiskinan yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan dalam segi jumlah maupun persentasenya, terkecuali pada tahun 2006, September 2013 dan Maret 2015. Peningkatan kemiskinan pada periode tersebut disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan pokok yang terpengaruh atas naiknya harga bahan bakar minyak. Untuk diketahui, proyeksi penduduk miskin tahun 2018 mencapai 26,58 juta jiwa (10,12 persen), namun release terbaru BPS menunjukkan bahwa jumlah

penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan menjadi 35,95 juta jiwa (9,82 %) pada Maret 2018 ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), Juli 2018).

Indonesia adalah negara besar dengan Proyeksi Penduduk pada tahun 2018 mencapai 265 015,3 juta jiwa. Komposisi penduduk laki-laki berjumlah 133 136,1 juta jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 131 879,2, dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi (BPS, 2015).

Masalah kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi Bangsa Indonesia, karena masalah kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Kemiskinan dalam aspek ekonomi menyebabkan tingkat kejahatan di dalam masyarakat tinggi, karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang di dalam lingkungan sosial masyarakat. sehingga permasalahan kemiskinan bukan masalah yang biasa dan berhubungan dengan aspek-aspek lainnya (Sugiarti, 2014 p. 3)

Hasil Proyeksi dan Analisis Kemiskinan di Indonesia merumuskan bahwa kemiskinan adalah ketidak sanggupannya dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan dengan mengukur tingkat pengeluaran, banyaknya jumlah pengeluaran ini lah yang menjadi garis kemiskinan. Jadi penduduk miskin adalah, penduduk yang mempunyai pengeluaran di bawah garis kemiskinan (BPS, 2015)

Pemerintah Indonesia sejauh ini telah berupaya dalam mengatasi kemiskinan dan kekurangan pangan melalui beberapa program, menurut Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2015 (BPS, 2015) pada orde pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat program untuk masyarakat

miskin dalam upaya mengatasi kemiskinan dan kekurangan pangan. Program tersebut diantaranya, Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program tersebut telah berjalan namun permasalahan kemiskinan dan kekurangan pangan di Indonesia tergolong masih tinggi.

Indikator yang di gunakan BPS salah satunya untuk mengukur kemiskinan adalah kebutuhan dasar dalam bidang pangan. Masyarakat miskin adalah, yang hanya sanggup makan sehari dua kali dan hanya mengkonsumsi ayam, daging atau susu hanya sekali dalam seminggu BPS (2015). Artinya kekurangan atau tidak maksimalnya masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar bidang pangan sebagai pemicu timbulnya tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Dalam upaya mengatasi hal tersebut, pemerintah menciptakan sebuah program yang bernama Beras Miskin (Raskin).

Raskin adalah upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia dengan cara meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar pangan berupa beras. Menurut BPS (2015) menjelaskan bahwasannya kecukupan nilai transfer dan ketepatan sasaran program Raskin terhadap masyarakat miskin, menjadi ukuran efektifnya program tersebut dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan yang ada.

Namun hingga saat ini program bantuan pemerintah dinilai kurang efektif dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan dan kekurangan pangan yang terjadi di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan manfaat

secara menyeluruh atas program-program yang ada ([www.okezone.com](http://www.okezone.com), Oktober 2016).

Program Raskin menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat, seperti masih ada penerima Raskin yang bukan hanya masyarakat miskin, kualitas beras yang dibagikan buruk, jumlah beras yang di terima tidak sesuai dengan aturan dan harga tebus yang terlampaui lebih tinggi dari aturan sebenarnya. Permasalahan seperti ini harus cepat diatasi agar tidak mengganggu proses penyelesaian permasalahan kemiskinan dan kekurangan pangan (Romli, 2017; Junaidi, Setiawan, dan Prastiwi, 2017)

Jacobus (2015) mengungkapkan jika sejatinya, tingkat keberhasilan program Raskin dalam penanggulangan kemiskinan dan kekurangan yang dilaksanakan pemerintah dapat diukur dengan pendekatan Indikator 6T (Mayang Shahira Junaidi 2017, p. 274), diantaranya:

1. Tepat Sasaran.
2. Tepat Jumlah.
3. Tepat Harga.
4. Tepat Waktu.
5. Tepat Kualitas.
6. Tepat Administrasi.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan efektifitas dan ketepatan program, Raskin ditransformasikan dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial pangan. Bantuan sosial pangan dapat disalurkan berupa beras maupun dalam bentuk bantuan non tunai lainnya. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 228/PMK/.05/2016

tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.05/2015, tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga, rastra berubah menjadi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra).

Bansos Rastra merupakan bantuan dari pemerintah berupa beras sebanyak 10 kg tanpa adanya biaya tebusan yang disalurkan setiap bulan kepada masyarakat miskin dengan kualitas yang baik. Program Bansos Rastra merupakan upaya pemerintah meringankan beban dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pokok pangan berupa beras, yang menjadi hak dasar masyarakat (Hikmat, 2017).

Namun, berjalannya Bansos Rastra hingga saat ini masih menimbulkan permasalahan di dalam pemerintahan dan masyarakat desa. Seperti yang di muat dalam laman berita ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), januari 2018 ), telah terjadi penolakan terhadap proses pendistribusian Bansos Rastra di seluruh desa Kabupaten Karawang, dianggap bahwa proses distribusi berpotensi tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan data yang ada di tingkat desa.

Permasalahan juga terjadi di Desa Bukit Selabu, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan. Berdasarkan berita ([Segerindo.com](http://Segerindo.com), Februari 2018) atas dasar pernyataan kepala desa menyebutkan bahwasannya, jumlah Bansos Rastra yang diterima oleh pihak desa tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Terdapat perselisihan antara jumlah data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tingkat desa dengan data dari pemerintah pusat, sehingga banyak masyarakat yang seharusnya menerima tetapi tidak terdaftar sebagai penerima Bansos Rastra.

Bansos Rastra diduga kuat dijadikan ajang pungutan liar (pungli), hal ini dinyatakan oleh laman berta ([kediri.memo.co.id](http://kediri.memo.co.id), Januari 2018). Pristiwa pungutan liar terjadi di Kabupaten Nganjuk Kecamatan Tanjung Anom, dengan rata-rata pungutan dari Rp1.000,00 sampai Rp2.000,00 /KPM, dengan dalih uang pungutan tersebut untuk mengganti ongkos kirim atau uang pemerataan. Pungutan liar juga terjadi di Desa Seberkat, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Berdasarkan berita ([Hariankriminal.online](http://Hariankriminal.online), April 2018) menyatakan bahwasannya, banyak warga masyarakat miskin yang mengeluh atau merasa keberatan dengan adanya biaya tebusan sebesar Rp2.500,00/kg dalam proses distribusi Bansos Rastra.

Permasalahan yang sama terjadi di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kecamatan Malingping, terdapat oknum Kades diduga menerima uang pungli, hal ini diberitakan oleh ([kabar-banten.com](http://kabar-banten.com), Februari 2018). Umumnya atau aturannya, pendistribusian beras yang harus diterima KPM sebanyak 10 Kg dan tanpa biaya alias gratis namun pada kenyataannya KPM tidak menerima beras seperti yang diamanatkan dalam ketentuan yakni 10 Kg karena dibagi rata dan mereka yang menerima baik yang tercantum dalam KPM maupun tidak, memberikan kebijakan per liter Rp1.000,00.

Pungutan liar pada Program Bansos Rastra juga terjadi di Provinsi Lampung, tepatnya di Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Berita ([News.ilmci.com](http://News.ilmci.com), Agustus 2018) berdasarkan keterangan masyarakat menyatakan bahwa, masyarakat harus membayar uang sebesar Rp5.000,00 untuk menebus beras tersebut dan masyarakat mengatakan bahwa beras tersebut di potong sebanyak 1 Kg dengan alasan yang tidak jelas.



Permasalahan pungutan liar yang terjadi di beberapa wilayah pada program Bansos Rastra adalah suatu fenomena yang telah membudaya di kalangan masyarakat eselon tertinggi hingga eselon masyarakat terkecil. pungutan liar adalah penyakit sosial dalam masyarakat yang tidak lepas dari zaman kelabu masalalu (Ramadhani, 2017 p. 265)

Program Bansos Rastra adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar pangan. Pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan benar atas dasar aturan-aturan yang ada menjadi tanggung jawab pemerintah tingkat tertinggi maupun tingkat terendah, pelayanan tersebut semata-mata hanya untuk kepuasan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat harus secara sukarela atau dengan biaya sesuai dengan aturan dan tidak menggolong-golongkan atas dasar kepentingan-kepentingan individu tertentu.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas menarik inisiatif penulis untuk melakukan pengamatan bagaimana proses pelaksanaannya di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Hasil pengamatan sementara, KPM Bansos Rastra di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur harus menanggung biaya sebesar Rp5.000,00 – Rp10.000,00 /10 kg beras, hal ini tentu bertentangan dengan aturan yang seharusnya dalam proses pelaksanaan Program Bansos Rastra dan bertentangan dengan salah satu indikator keberhasilan Program Bansos Rastra yakni Tepat Harga.

Terdapatnya beban biaya yang harus di tanggung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) menyebabkan

kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan tentang bagaimana proses pelaksanaan Program Bansos Rastra, yaitu belum optimalnya pelaksanaan atau implementasi kebijakan Program Bansos Rastra yang disebabkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga secara umum keberhasilan Bansos Rastra masih belum sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Program Bansos Rastra oleh Pemerintah Indonesia. Serta masalah yang terjadi juga mempengaruhi proses atau usaha Pemerintah dalam upaya pengentasan permasalahan kemiskinan yang di hadapi oleh Bangsa Indonesia. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah tentang tentang penyebab munculnya beban biaya yang harus ditanggung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas , maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

”apa penyebab munculnya beban biaya yang harus ditanggung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan munculnya beban biaya yang harus ditanggung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang saya lakukan diantaranya:

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini saya harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu sosial pada khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial dan untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam berfikir ilmiah sistematis ketika melihat suatu fenomena sosial yang ada di sekitar serta sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut.
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi masukan positif dan manfaat bagi pemerintah khususnya pada bidang pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

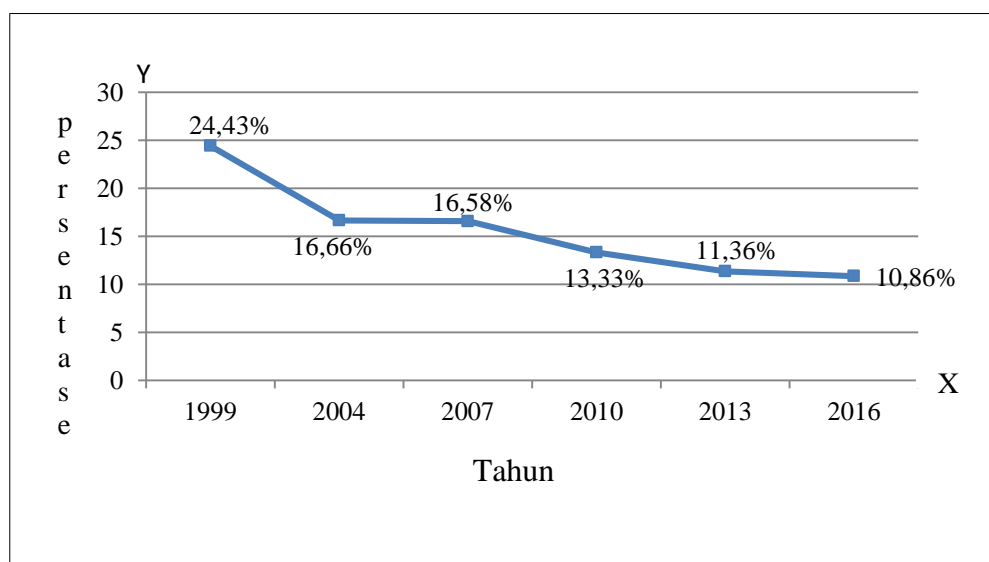
### A. Kemiskinan

Kemiskinan dan kekurangan pangan terjadi di berbagai negara global, mayoritas negara dengan angka kemiskinan yang tinggi berada di benua Asia dan Afrika. Didalam laporan Inter-Agency and Expert Group on Indikator MDG (2015) lebih dari 80 persen jumlah masyarakat di benua Asia dan Afrika berada dalam garis kemiskinan secara global, hampir 60 persen dari 1 miliar masyarakat miskin dunia hanya tinggal di lima negara yaitu: India, Nigeria, China, Bangladesh dan Republik Demokratik Kongo.

Jumlah mutlak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan secara global mengalami penurunan dari 1,9 miliar pada tahun 1990 menjadi 1 miliar dalam tahun 2011 dan pada tahun 2015 diperkirakan bahwa 175 juta masyarakat miskin telah terangkat dari garis kemiskinan (*Inter-Agency and Expert Group on Indikator MDG, 2015*). Laporan lebih lanjut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan di dunia sampai 12 persen pada tahun 2015, Tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang menjadi 14 persen pada tahun 2015, turun dua pertiga dari tahun 1990 yang mencapai 47 persen. Dengan demikian, jumlah masyarakat miskin yang berada dibawah garis kemiskinan berkurang setengahnya dari tahun 1990 sampai tahun 2015.

Negara-negara berkembang dengan kepadatan penduduk tinggi seperti China dan India mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penurunan jumlah masyarakat miskin secara global. Negara-negara berkembang khususnya di benua Asia telah menemukan cara bagaimana menurunkan permasalahan kemiskinan yang di hadapinya, salah satunya negara Indonesia.

Periode 1999 – September 2017 secara umum kemiskinan yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan dalam segi jumlah maupun persentasenya, terkecuali pada tahun 2006, September 2013 dan maret 2015. Peningkatan kemiskinan pada periode tersebut disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan pokok yang terpengaruh atas naiknya harga bahan bakar minyak (BPS, 2015). Perkembangan persentase tingkat kemiskinan 1999 – September 2017 dapat dilihat di gambar 1.



Gambar 1. Presentase tingkat kemiskinan 1999-September 2017.

Sumber: BPS (2018)

Penduduk miskin pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang. Terjadi penurunan sebesar 1,19 juta orang dibandingkan maret 2017. Dibandingkan dengan september tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin menurun sebesar 1,18 juta orang. Berdasarkan tempat tinggal, periode Maret – September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 401,28 ribu orang, sedangkan di daerah pedesaan turun sebesar 786,95 ribu orang. Presentase kemiskinan di perkotaan turun menjadi 7,26 persen yang sebelumnya 7,72 persen dan di pedesaan turun menjadi 13,47 persen dari 13,93 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan september 2016 – september 2017 berdasarkan daerah dapat di lihat di tabel 1.

Tabel 1. Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin Berdasarkan Daerah, September 2016 – September 2017.

<b>Daerah/Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)</b>	<b>Presentase</b>
<b>Perkotaan</b>		
September 2016	10,49	7,73
Maret 2017	10,67	7,72
September 2017	10,27	7,26
<b>Pedesaan</b>		
September 2016	17,28	13,96
Maret 2017	17,10	13,93
September 2017	16,31	13,47
<b>Total</b>		
September 2016	27,76	10,70
Maret 2017	27,77	10,64
September 2017	26,58	10,12

Sumber: BPS (2018)

Setelah memperhatikan Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua bagian komponen yaitu, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada tabel 2 peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan dengan peran komoditi bukan makanan. Sumbangan GKM terhadap GK pada september 2017 sebesar 73,35 persen. Garis kemiskinan digunakan sebagai batas pengelompokan penduduk miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang mempunyai pengeluaran dibawah Garis Kemiskinan (BPS, 2015).

Tabel 2. Daftar Komoditi yang Memberikan Sumbanngan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), September 2018.

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Makanan:</b>	70,63	<b>Makanan:</b>	76,77
<b>Beras</b>	18,80	<b>Beras</b>	24,25
<b>Rokok</b>	9,98	<b>Rokok</b>	10,70
<b>Daging sapi</b>	5,71	<b>Telur ayam ras</b>	3,18
<b>Telur ayam ras</b>	3,63	<b>Gula pasir</b>	2,95
<b>Daging ayam ras</b>	3,36	<b>Daging sapi</b>	2,83
<b>Mie instan</b>	2,24	<b>Daging ayam ras</b>	2,22
<b>Gula pasir</b>	2,17	<b>Mie instan</b>	2,11
<b>Kopi bubuk &amp; instan</b>	1,72	<b>Bawang merah</b>	1,83
<b>Roti</b>	1,63	<b>Roti</b>	1,75
<b>Kue basah</b>	1,58	<b>Kue basah</b>	1,74
<b>Tempe</b>	1,50	<b>Kopi bubuk &amp; instan</b>	1,70
<b>Bawang merah</b>	1,47	<b>Tempe</b>	1,45
<b>Lainnya</b>	16,84	<b>Lainnya</b>	19,79
<b>Bukan Makanan:</b>	29,37	<b>Bukan Makanan:</b>	23,23
<b>Perumahan</b>	8,79	<b>Perumahan</b>	7,36
<b>Bensin</b>	4,24	<b>Bensin</b>	3,18
<b>Listrik</b>	3,85	<b>Listrik</b>	2,04
<b>Pendidikan</b>	2,14	<b>Pendidikan</b>	1,24
<b>Pakaian jadi</b>	0,08	<b>Sabun cuci</b>	0,78
<b>Lainnya</b>	7,17	<b>Lainnya</b>	6,64

Sumber: BPS (2018)



Komoditi yang berpengaruh terhadap Garis Kemiskinan (GK) di perkotaan maupun di pedesaan pada umumnya sama. Komoditi dengan sumbangan terbesar yaitu beras, sebesar 18,80 persen di perkotaan dan 24,52 persen di pedesaan. Sehingga dengan cara meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar berupa beras, dapat menurunkan jumlah kemiskinan di Indonesia secara signifikan.

BPS dalam release terbaru menyatakan bahwa pada tahun 2018 penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan menjadi 35,95 juta jiwa (9,82 %) pada Maret 2018. Hal ini menjadi prestasi yang terbaik dalam penurunan tingkat kemiskinan, karena untuk pertama kalinya presentase tingkat kemiskinan di Indonesia menyentuh angka satu digit ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), Juli 2018).

## **B. Program Penanggulangan Kemiskinan**

Indonesia adalah salah satu negara yang sukses dalam memadukan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan penurunan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan adalah suatu prioritas dalam pembangunan nasional. BPS (2015) mencatat bahwa, pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan berbagai langkah konsolidasi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang terwujud dalam beberapa instrumen yaitu:

- a) Kluster I: Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar,

pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Pemenuhan hak dasar berfokus pada memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin agar lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditunjukkan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan kondisi masyarakat miskin bersifat rentan, tetapi mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Paket ini terwujud antara lain: beras miskin (raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

- b) Kluster II: Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya memberi bantuan secara langsung kepada masyarakat miskin karena kemiskinan disebabkan bukan hanya oleh aspek materil saja, akan tetapi kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi yang ada didalam diri dan lingkungan sekitar.

Kelompok pemberdayaan masyarakat adalah sebuah tindak lanjut dalam proses pengentasan kemiskinan. Ditahap ini masyarakat miskin mulai menyadari potensi yang ada dapat digunakan untuk lepas dari kemiskinan. Pemberdayaan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan bukan hanya

melakukan penyadaran masyarakat terhadap potensi yang ada, melainkan juga mendorong partisipasi masyarakat miskin dalam proses pembangunan daerah. Kelompok pemberdayaan merupakan masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah masyarakat miskin yang mampu untuk menggunakan potensi yang dimilikinya namun terdapat keterbatasan. Paket ini terwujud dalam program PNPM Mandiri.

- c) Kluster III: Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Tujuan program ini adalah, memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Hal terpenting dalam program ini adalah, memberikan akses seluas-luasnya masyarakat miskin untuk dapat melakukan usaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan adalah masyarakat hampir miskin yang mempunyai usaha pada skala mikro dan kecil. Namun, program ini juga dapat ditujukan untuk masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam ekonomi.

Paket program ini terwujud dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR).

- d) Kluster IV: Program Rumah Sangat Murah, Program Kendaraan Angkutan Umum Murah, Program Air Bersih Untuk Rakyat, Program Hemat Listrik, dan Hemat Air, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan.

Pengentasan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini, upaya-upaya melalui program-program pengentasan kemiskinan secara efektif dan cepat

telah dilakukan oleh pemerintah. Menurut laman berita (antaranews.com, juli 2017) presiden Joko Widodo menyoroti tiga program pengentasan kemiskinan

yaitu:

a) Stabilitas Harga Bahan pokok

Presiden Jokowi menginstruksikan agar stabilitas harga bahan pokok dijaga secara baik dan kebijakan-kebijakan yang mendorong kenaikan kebutuhan pokok harus dikalkulasi secara benar. Apabila terjadi kenaikan terhadap bahan pokok akan mempengaruhi garis kemiskinan sehingga biaya hidup masyarakat miskin akan naik, hal ini akan membuat kenaikan pendapatan penduduk miskin tidak berarti.

b) Program Pertanian, UMKM, dan Dana Desa

Presiden Jokowi menuntut program pertanian, UMKM, dan Dana Desa Mampu menjangkau 40 persen penduduk lapisan terbawah. Kementerian terkait harus mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat miskin yang berkerja di sektor pertanian dan informal.

c) Program Bantuan Sosial

Presiden Jokowi meminta agar program-program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras Sejahtera dapat disalurkan secara tepat waktu sehingga dapat meringankan beban hidup masyarakat miskin dengan menggunakan data yang akurat, mutakhir, satu dan terpadu.

Melalui tiga prioritas program diatas, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

### **C. Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra)**

Kementrian Sosial (2018) menyatakan bahwa Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) adalah strategi dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam bentuk pangan yang dilakukan secara nasional. Tahun 2018 menjadi titik awal peralihan yang semula berpola subsidi menjadi pola bantuan sosial. Dengan demikian terdapat perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan program Bansos Rastra, yaitu pada Bansos Rastra tidak terdapat biaya/harga tebusan yang harus di tanggung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Perum BULOG dalam pelaksanaan program Bansos Rastra bertugaskan untuk mendistribusikan hingga Titik Distribusi (TD) . Kemudian pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pendistribusian ke Titik Bagi (TB). Penyaluran Bansos Rastra dilakukan secara rutin tanggal 25 setiap bulannya, terkecuali di daerah tertentu yang memerlukan perlakuan khusus yang disebabkan letak geografis, model transportasi, keterbatasan sarana dan prasarana.

Bansos Rastra diharapkan dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan dasar pangan masyarakat miskin, sehingga dapat mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Mekanisme pelaksanaan program Bansos Rastra tidak mengalami banyak perubahan dengan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang dilaksanakan hingga 2017, terkecuali dalam hal pertanggung jawaban dalam proses penyaluran, sehingga dukungan serta peran aktif pemerintah Kabupaten/Kota sangat diharapkan.

a) Tujuan Bansos Rastra

Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memberikan bantuan sosial berupa beras dengan kualitas medium berjumlah 10 Kg tanpa dikenakan biaya/harga apapun, dengan periode yang ditentukan melalui kebijakan pemerintah.

b) Manfaat Bansos Rastra

1. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus mekanisme penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
2. Meningkatkan akses pangan secara baik dalam bentuk fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (tanpa biaya tebusan) kepada KPM.
3. Sebagai sarana bagi hasil usaha tani padi.
4. Menstabilkan harga beras di tingkat masyarakat (pasar).
5. Mengendalikan inflasi melalui intervensi pemerintah dan upaya menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

c) Dasar Hukum Bansos Rastra

Pelaksanaan program Bansos Rastra tahun 2018 di atur melalui Petunjuk Teknis (Juknis) dan Pedoman Umum (Pedum) Bansos Rastra, setidaknya terdapat 30 undang-undang yang mengatur tentang Bansos Rastra. Undang-undang tersebut disusun oleh pihak-pihak terkait guna menjadi dasar hukum dan landasan pelaksanaan program Bansos Rastra.

d) Definisi-definisi dalam Bansos Rastra

Pemerintah melalui kementerian-kementerian terkait dalam maksud untuk memberi pemahan terhadap masyarakat, menjelaskan beberapa istilah atau

definisi yang terdapat dalam pelaksanaan program Bansos Rastra. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk mempermudah dalam pertanggung jawaban dan pelaksanaan program Bansos Rastra oleh pihak terkait. Di bawah ini adalah beberapa definisi-definisi yang kerap muncul di lingkungan masyarakat dalam pelaksanaan program Bansos Rastra

1. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin guna melindungi masyarakat, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Masyarakat miskin atau tidak mampu adalah masyarakat yang berdasarkan kriteria tertentu ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
3. Bansos Pangan adalah bantuan sosial terkait pangan, yang terdiri dari Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
4. Bansos Rastra (Beras Sejahtera) adalah bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada KPM sejumlah 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus.
5. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Bansos Rastra.
6. Kemasan Bansos Rastra adalah kemasan berlogo Perum BULOG sesuai dengan ketentuan Kementerian Sosial.
7. Kualitas Bansos Rastra adalah beras kualitas medium dari Perum BULOG sesuai dengan ketentuan pada Kebijakan Perberasan yang berlaku.
8. Pagu Bansos Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM

Bansos Rastra untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.

9. Pelaksana Distribusi adalah kelompok/tim kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat untuk menerima Bansos Rastra dari Perum BULOG dan menyalurkannya kepada KPM.
10. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan beras Bansos Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
11. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik di desa/kelurahan sebagai tempat atau lokasi penyerahan Bansos Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Tikor Bansos Pangan) dengan Perum BULOG.

#### **D. Penerima Manfaat Bansos Rastra**

Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Bansos Rastra (2018) penerima manfaat Bansos Rastra adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah didaerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang nama dan alamatnya termasuk dalam Daftar KPM yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Data sumber KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu Program Penangan Fakir Miskin (DT-PPFM), yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015.



DT-PPFM dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Daftar Penerima Manfaat (DPM) atau daftar KPM Bansos Rastra disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### **E. Landasan Teori Penelitian**

Pelaksanaan Bansos Rastra hingga saat ini masih menimbulkan masalah, di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung timur KPM harus menanggung biaya sebesar Rp 5.000 samapai Rp 10.000 /10 kg beras. Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan program Bansos Rastra, yakni KPM tidak menanggung biaya apapun karena bantuan ini bersifat bantuan sosial. Sehingga peristiwa munculnya biaya yang harus di tanggung oleh KPM secara hukum termasuk dalam tindak pidana Pungutan Liar.

Pungutan Liar atau pungli adalah beban biaya/upah di tempat yang tidak seharusnya biaya/upah dipungut pada kegiatan atau tempat tertentu. Sehingga dapat diartikan bahwa kegiatan pungutan biaya/upah seseorang terhadap pihak lain tanpa adanya landasan peraturan yang kuat maka hal tersebut adalah praktik kejahatan atau perbuatan pidana (Rahmadi, 2017 p.271).

Pungutan liar pada rumusan korupsi pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UU Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak

pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, pungutan liar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara atau penyelenggara dengan bermaksud menguntungkan diri sendiri maupun kelompok dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan wewenang untuk memaksa orang lain memberi ataupun menerima sesuatu dari pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan, beban biaya yang harus di tanggung oleh KPM pada program Bansos Rastra adalah tindakan pidana pungutan liar. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut adalah tindakan melawan hukum dan tidak ada aturan manapun untuk membenarkan peristiwa tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan program Bansos Rastra telah menimbulkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang berupa pungutan liar.

Menurut Bawengan (1974) di dalam mazhab aliran sosialis yang dipelopori oleh Karl Mark-Angels menyatakan bahwa, tindak kejahatan muncul di dalam masyarakat disebabkan oleh tekanan ekonomi yang tidak seimbang. Sehingga perlu pensejahteraan ekonomi di dalam masyarakat untuk mengatasi tindak kejahatan tersebut.

Edwin H Sutherland (1969) menyatakan bahwa mazhab tersebut dipengaruhi determinisme ekonomi, tingkat kejahatan merupakan konsekuensi dari masyarakat kapitalis akibat dari sistem ekonomi yang menimbulkan penindasan atau kerugian, sehingga memunculkan peluang yang mendukung terjadinya kejahatan (Saputra, 1973, p. 278). Berdasarkan teori tersebut, penulis meyakini bahwa beban biaya

pada Bansos Rastra disebabkan karena adanya tekanan ekonomi pada petugas penyalur Bansos Rastra di Titik Bagi (TB) atau desa. Sehingga untuk mengetahui hal yang sebenarnya penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab munculnya beban biaya pada Bansos Rastra di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

## **F. Kerangka Pikir**

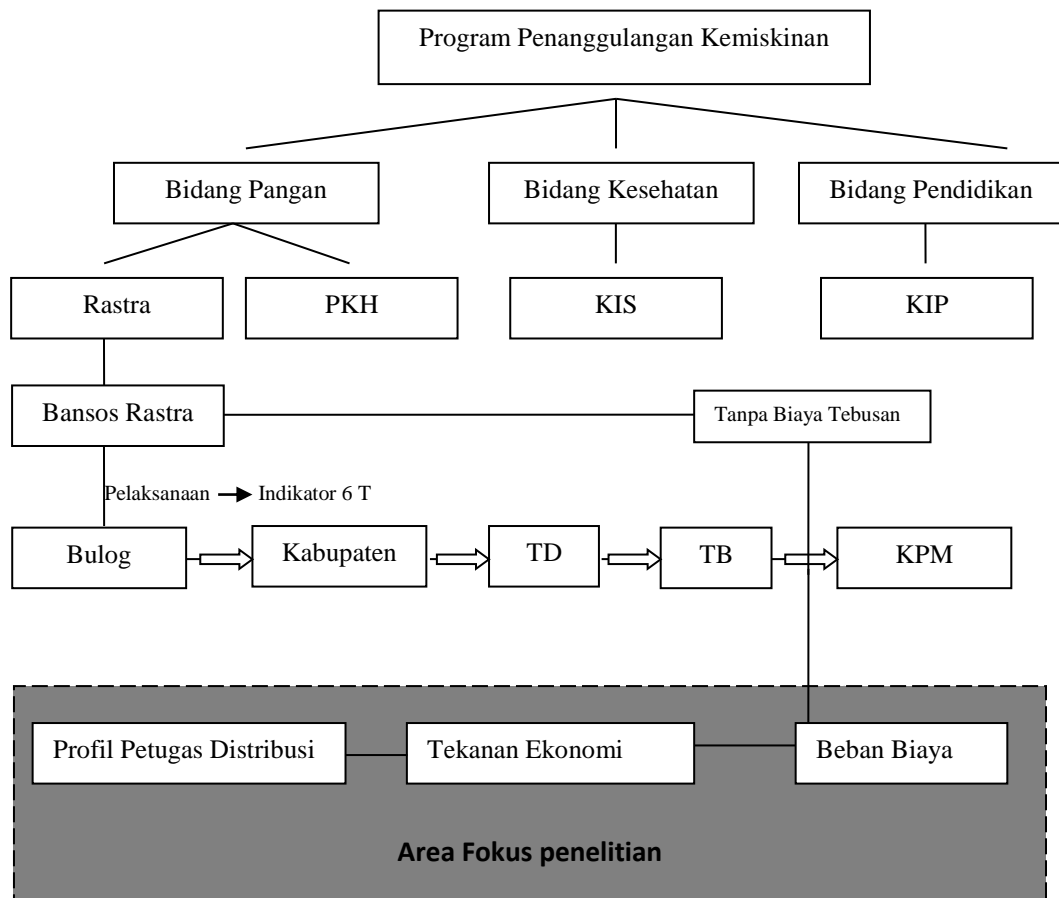
Masalah kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi Bangsa Indonesia, karena masalah kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Kemiskinan dalam aspek ekonomi menyebabkan tingkat kejahatan di dalam masyarakat tinggi, karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang di dalam lingkungan sosial masyarakat. sehingga permasalahan kemiskinan bukan masalah yang biasa dan berhubungan dengan aspek-aspek lainnya.

Kekurangan atau tidak maksimalnya masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar bidang pangan sebagai pemicu timbulnya tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Dalam upaya mengatasi hal tersebut, pemerintah menciptakan sebuah program yang bernama Beras Miskin (Raskin). Raskin adalah upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia dengan cara meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar pangan berupa beras.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 228/PMK/.05/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.05/2015, tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga, rastra berubah menjadi

Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra). Hal ini adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan efektifitas dan ketepatan program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian terdapat perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan program Bansos Rastra, yaitu pada Bansos Rastra tidak terdapat biaya/harga tebusan yang harus di tanggung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Namun, berjalannya Bansos Rastra hingga saat ini masih menimbulkan permasalahan di dalam pemerintahan dan masyarakat desa. Permasalahan munculnya beban biaya yang terjadi di beberapa wilayah pada program Bansos Rastra adalah suatu fenomena yang telah membudaya di kalangan masyarakat eselon tertinggi hingga eselon masyarakat terkecil. Beban biaya pada Bansos Rastra disebabkan karena adanya tekanan ekonomi pada petugas penyalur Bansos Rastra.



Gambar 2. Kerangka pikir.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui peristiwa atau fenomena yang sebenarnya terjadi di dalam lingkungan masyarakat, sehingga dapat mempermudah penulis untuk mengungkap makna atau latar belakang suatu peristiwa atau fenomena yang diamati. Dalam proses penelitian, penulis terjun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung fenomena yang sebenarnya dan melakukan pendekatan secara mendalam terhadap informan agar dapat menjelaskan fenomena yang terjadi secara detail. Selanjutnya, pendekatan metode penelitian kualitatif yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif guna menjawab permasalahan yang diteliti. Secara rinci, tipe deskriptif yang digunakan dirasa tepat untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan peristiwa munculnya beban biaya pada Bansos Rastra di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidoejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena, terdapat permasalahan yang menarik bagi penulis. Serta ada kemudahan penulis dalam mencari informasi dan lokasi penelitian cukup dekat dengan tempat tinggal penulis, sehingga dapat menekan biaya dalam proses penelitian. Selanjutnya, penelitian ini adalah suatu upaya penulis untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di desanya, hal ini adalah suatu bentuk pengabdian terhadap masyarakat atas dasar kecintaan kepada tanah lahir penulis.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Hal ini dirasa penting untuk membatasi masalah yang akan diteliti, sehingga pembahasannya nanti tidak meluas walaupun penelitian ini bersifat sementara dan masih akan terus berkembang disaat proses penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah, penyebab munculnya beban biaya pada pogram Bansos Rastra di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

Lebih lanjut dalam konteks fokus penelitian, terdapat tiga hal pokok yang disoroti dan akan dikaji secara mendalam, diantaranya:

- a) Penyebab munculnya beban biaya pada Bansos Rastra (tekanan ekonomi).
- b) Proses terjadinya pemungutan beban biaya pada KPM Bansos Rastra.

- c) Latar belakang (profil) pelaksana distribusi Bansos Rastra di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Penentuan Informan**

Afrizal (2014) menyatakan, informan adalah yang memberikan informasi tentang dirinya ataupun tentang suatu peristiwa kepada orang yang bertanya kepadanya. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis hendaknya menentukan kriteria dalam penentuan informan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana penentuan pemilihan informan atas dasar pertimbangan khusus dari penulis berdasarkan kebutuhan analisis dalam penelitian. Menurut Iskandar (2010) *purposiv sampling* adalah teknik penentuan berdasarkan penilaian, subjektif penulis, karakteristik tertentu yang yang dianggap bersangkutan dengan karakteristik populasi yang telah diketahui sebelumnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Lebih lanjut, demi menjaga identitas informan dan kerahasiaan informasi, penulis tidak akan membuka seluruh identitas informan yang memberikan informasi tentang permasalahan yang penulis teliti. Permasalahan ini bagi penulis adalah kasus sensitif yang berhubungan dengan tindak pidana, maka bagi penulis dirasa penting untuk membatasi informasi tentang identitas informan.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap memahami atau mengetahui dan mengalami secara langsung peristiwa yang akan diteliti oleh penulis. Adapun informan dalam proses penelitian ini diantaranya:



- a) Pemerintah, pelaksana penyaluran Bansos Rastra di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Dusun dan Ketua RT. Informan ini dipilih karena dianggap sebagai pihak penanggung jawab, pengawas dan pelaksana pendistribusian Bansos Rastra kepada KPM.
- b) KPM Bansos Rasta di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Informan ini dipilih karena dianggap orang yang mengalami peristiwa serta secara tidak langsung orang yang paling dirugikan dalam peristiwa pungutan liar pada Bansos Rastra.

Mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan di atas, jumlah informan untuk penelitian ini setidaknya ditetapkan sebanyak 5 orang, terdiri dari 3 petugas distribusi Bansos Rastra dan 2 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Lebih lanjut perlu diketahui bahwa, tidak semua informan yang penulis temui untuk mencari informasi tentang permasalahan yang penulis teliti, melainkan terdapat informan yang hanya untuk mengkonfirmasi atas keterangan-keterangan informan sebelumnya agar penulis mendapat informasi yang sebenar-benarnya.

## **E. Sumber Data**

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber:

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis. Sumber data primer berupa informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi untuk memecahkan masalah yang diajukan.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung, yaitu data yang diperoleh peneliti melalui pengumpulan dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang berhubungan dengan peristiwa yang akan diteliti. Pada penelitian ini juga dilakukan proses instrumen pendataan, meliputi data tentang KPM Bansos Rastra dan profil desa. Instrumen data tersebut digunakan untuk melengkapi hasil wawancara pada informan dan mempermudah penulis dalam proses penelitian serta memperkaya informasi yang didapatkan.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data di antaranya:

### a) Wawancara Mendalam

Cholid Narbuko (2003) berpendapat bahwa, metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam proses penelitian secara lisan, dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dengan menggunakan

metode ini diharapkan dapat memperoleh data primer yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian, yang dianggap menggambarkan peristiwa yang diteliti. Wawancara dalam proses penelitian ini digunakan untuk mengetahui hal umum tentang peristiwa pungli pada Bansos Rastra, serta membentuk ikatan emosi antara penulis dengan informan agar segala hal informasi dapat digali secara mendalam. Hasil dari wawancara mendalam dengan informan berbentuk transkrip wawancara.

Pada tahap pelaksanaan wawancara dalam proses penelitian, pertamakali yang penulis temui untuk mencari informasi tentang peristiwa yang penulis teliti adalah salah satu Kepala Dusun di Desa Sidorejo. Proses wawancara terjadi pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 09.30 – 11.00 . Pada saat penulis menghampiri informan, penulis disambut dengan senyuman dan sapaan oleh informan. Setelah itu penulis membuka obrolan kepada informan ringan lalu menginformasikan bahwa penulis akan mencari informasi tentang beban biaya pada Bansos Rastra. Namun setelah penulis berbicara mengenai hal tersebut, terlihat gelagat yang kurang nyaman atau respon yang kurang baik pada diri informan. Hal ini dikarenakan informan sedang bersama dengan orang-orang aparatur desa yang sifatnya tertutup atau sulit untuk berdiskusi, lalu informan memberikan intruksi melalui bisikan kepada penulis bahwa proses wawancara tidak bisa dilakukan dilokasi tersebut. Menanggapi hal tersebut untuk kenyamanan dan kemudahan penulis untuk mencari informasi tentang permasalahan yang penulis teliti akhirnya penulis memutuskan untuk mengajak informan menuju rumah salah satu warga untuk

melakukan proses wawancara. Hal ini pun disetujui oleh informan, lantas kita menuju rumah salah satu warga tersebut, sesampainya di rumah warga penulis langsung melakukan wawancara terhadap informan sampai penulis merasa cukup untuk mengetahui permasalahan yang terjadi sebenarnya.

Kemudian penulis melanjutkan proses pencarian informasi untuk menindak lanjuti atas informasi yang sebelumnya, dengan menemui salah satu Ketua Rt di Desa Sidorejo. Proses wawancara dilakukan pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 19.00-21.00. Proses wawancara diawali dengan obrolan santai, menanyakan tentang kabar dan prihal lainnya. Informan cukup antusias dalam membantu penulis dalam mencari informasi, mungkin hal ini disebabkan karena penulis kenal cukup dekat dengan informan. Proses wawancara berjalan dengan cukup lancar, sehingga penulis mendapatkan informasi yang cukup banyak. Diselang-selang proses wawancara penulis disuguhkan minuman kopi panas dan makanan khas Jawa Rengginang yang cukup gurih dan enak. Hal ini dapat menambah keakraban antara penulis dan informan serta menambah suasana nyaman dalam proses wawancara.

Setelah penulis mendapatkan informasi dari kedua informan di atas, lantas tidak membuat puas penulis dalam mencari informasi tentang peristiwa yang penulis teliti. Dengan demikian, guna mendapat informasi agar dapat mengetahui peristiwa yang terjadi secara mendalam lagi, penulis menemui informan yang ketiga, yakni ketua pelaksana dan penanggung jawab proses distribusi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sidorejo. Proses wawancara

terjadi pada tanggal 27 Januari 2019 pukul 09.00-10.30 bertempat dirumah kediaman informan. Awalnya penulis cukup ragu untuk mendatangi rumah informan karena suatu hal tertentu. Namun informan tetap memberanikan diri agar semua berjalan lancar, setelah berada dirumah informan Penulis disambut dengan suka cita dan keramah tamahan dari informan, hal ini cukup meredam keraguan penulis pada awal tadi terhadap informan. Proses wawancara diawal dengan obrolan santai, menanyakan tentang kabar dan prihal lainnya. Informan cukup antusias dalam membantu penulis dalam mencari informasi, mungkin hal ini disebabkan karena penulis kenal cukup dekat dengan informan dari kecil. Proses wawancara berjalan dengan cukup lancar, sehingga penulis mendapatkan informasi yang cukup banyak. Diselang-selang proses wawancara penulis tidak disuguhkan minuman apapun, sehingga penuls berfikir apakah di rumah informan dilanda kekeringan. Namun hal ini tidak mengurangi keakraban antara penulis dan informan serta suasana nyaman dalam proses wawancara.

Penulis memperoleh informasi yang sangat banyak dan mendalam tentang peristiwa yang penuls teliti dari ketiga informan di atas, hal ini disebabkan karena ketiga informan tersebut adalah, orang-orang yang bersentuhan langsung dalam proses distribusi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sidorejo. Namun dengan begitu banyaknya informasi dari informan-informan di atas, penulis merasa perlu adanya konfirmasi atas informasi-informasi yang

telah diberikan kepada penulis kepada pihak-pihak yang menerima bantuan.

Selanjutnya penulis menemui dua informan yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) di Desa Sidorejo, guna mengkonfirmasi atas keterangan yang diberikan oleh informan sebelumnya. Kedua informan tersebut mempunyai kriteria yang berbeda, informan pertama mendapat bantuan tanpa adanya beban biaya dalam proses distribusi dan informan kedua mendapat bantuan dengan adanya beban biaya dalam proses distribusi. Hal ini penulis lakukan agar mendapat informasi yang lebih bervariasi mengenai peristiwa yang penulis teliti. Proses wawancara terjadi pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 14.00-16.00 di kediaman informan. Pertama penulis mengunjungi rumah informan yang mendapat bantuan tanpa adanya beban biaya, setelah itu penulis melakukan wawancara. Seperti biasanya proses wawancara diawal dengan obrolan santai, menanyakan tentang kabar dan prihal lainnya. Informan cukup antusias dalam membantu penulis dalam mencari informasi, mungkin hal ini disebabkan karena penulis kenal cukup dekat dengan informan dari kecil. Proses wawancara berjalan dengan cukup lancar, tidak banyak informasi yang penulis dapat, namun cukup untuk mengkonfirmasi keterangan dari informan-informan sebelumnya, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan serta gangguan pendengaran yang dialami oleh informan. Setelah itu penulis melanjutkan pencarian informasi kepada informan penerima bantuan yang dibebani beban biaya, Setelah sampai dirumah informan penulis langsung masuk

kerumah informan, ternyata informan sedang memasak untuk dirinya dan anaknya, lantas hal ini menuntut penulis untuk melakukan sesi wawancara secepatnya agar tidak mengganggu proses masak informan. Dalam proses wawancara penulis mampu mengungkapkan respon atau reaksi informan terhadap biaya yang harus di tanggungnya, sehingga hal ini cukup bagi penulis dalam proses pencarian informasi tentang permasalahan yang penulis teliti.

b) Observasi

Berdasarkan pendapat Marshal (1995), dengan melakukan observasi, penulis dapat mengetahui perilaku dan makna yang melekat pada perilaku tersebut (Sugiyono,2014). Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi fisik lokasi penelitian. Observasi dilakukan secara terus terang, dimana penulis menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa penulis sedang melakukan penelitian di lokasi tersebut. Hasil dari observasi ini berupa catatan lapangan. Alasan penulis menggunakan teknik observasi dalam penelitian, agar bisa mengamati kondisi masyarakat sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mendapatkan gambaran situasi permasalahan pungli pada Bansos Rastra, dengan mengamati secara umum peristiwa tersebut.

Penulis melakukan observasi sebanyak dua kali, yakni sebelum penelitian dan pada saat penelitian. Observasi yang penulis lakukan sebelum penelitian guna untuk melihat apakah ada permasalahan yang akan penulis teliti, sedangkan observasi yang dilakukan pada saat penelitian

dilaksanakan pada saat penulis melakukan wawancara dengan para informan

c) Studi Dokumentasi

Iskandar (2010) menyatakan, teknik ini merupakan proses menelaah terhadap rujukan-rujukan yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dimaksud berupa dokumen pribadi, dokumen resmi dan lain-lain. Didalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen berupa buku, artikel, surat kabar yang memuat tentang beban biaya pada Bansos Rastra, skripsi yang memuat tentang peristiwa pungli, jurnal melalui internet yang memuat tentang Bansos Rastra dan lain-lain. Metode dokumentasi diperlukan karena mempunyai nilai pengungkapan pada suatu hal peristiwa yang didokumentasikan. Sehingga untuk menunjang hasil deskripsi penelitian ini maka dokumentasi dijadikan sumber data dalam proses pelaksanaan Bansos Rastra.

### **G. Teknik Analisis Data**

Terdapat tiga langkah analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi:

a) Reduksi Data

Sugiyono (2014) menyatakan, mereduksi data sama saja merangkum hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini mereduksi data yakni



memfokuskan pada munculnya beban biaya Pada Bansos Rastra di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

b) Penyajian Data

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah disusun untuk memberikkan kemungkinan penarikan kesimpulan dan menganalisisnya. Penyajian data dengan baik sebagai cara utama bagi proses analisis metode kualitatif yang valid. Selanjutnya data yang akan di tampilkan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Penyebab munculnya beban biaya pada Bansos Rastra (tekanan ekonomi).
- b. Proses terjadinya pemungutan biaya pada KPM Bansos Rastra.
- c. Latar belakang (profil) pelaksana distribusi Bansos Rastra di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

c) Penarikan Simpulan atau Verifikasi

Miles dan Huberman (1992) menyatakan, penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah suatu tahap lanjut dimana peneliti menarik kesimpulan dari temuan data yang telah didapat di lapangan. hal Ini adalah sebuah interpretasi penulis atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen dari peristiwa yang diteliti (Sugiyono, 2014, p. 178). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi yang bertujuan menyimpulkan hasil data yang telah didapat dari hasil wawancara dan observasi, lalu mengecek kembali guna menghindari kesalahan.

## H. Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji transferabilitas, uji depenabilitas data (reliabilitas), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas). Adapun uji kredibilitas data yang dilakukan melalui teknik perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan member cek (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji kredibilitas data untuk memeriksa keabsahan data. Namun pada penelitian ini penulis hanya melakukan teknik triangulasi dan menggunakan bahan referensi.

- a) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dimaksud sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi pengumpulan data karena peneliti bertujuan untuk membandingkan informasi dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara kepada petugas pelaksana program Bansos Rastra dan KPM Bansos Rastra, guna mengecek kebenaran informasi tentang beban biaya pada Bansos Rastra di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya, setelah didapatkan data yang dibutuhkan, penulis kemudian menggunakan triangulasi sumber data, dimana selain melakukan wawancara dan observasi, peneliti juga melakukan dokumentasi guna menghasilkan bukti atau data yang bervariasi
- b) Menggunakan Bahan Referensi

Pada bagian ini, yang dimaksud bahan referensi yakni adanya pendukung atas bukti data yang telah ditemukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada informan, kemudian dalam melakukan wawancara tersebut didukung oleh adanya foto ataupun rekaman suara untuk menguji keabsahan data hasil penelitian.

#### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bagian bab ini penulis akan mendeskripsikan profil Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari sejarah singkat lahirnya Desa Sidorejo, kondisi geografis dan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) yang berjumlah 551 KK. Informasi mengenai hal tersebut diperoleh penulis melalui dokumen resmi dan profil desa tahun 2015. Dengan adanya deskripsi ini penulis berharap dapat memberikan gambaran tentang berbagai hal yang mendasari perkembangan Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

##### **A. Sejarah Singkat Desa Sidorejo**

Desa Sidorejo pada awalnya dibuka sejak tahun 1969, atas izin Tumpang Sari dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang berada dalam wilayah Binaan Kecamatan Labuhan Maringgai. Dalam perjalanan pembangunan Perkampungan Sidorejo terdapat banyak rintangan yang bertujuan untuk membubarkan Perkampungan Sidorejo pada saat itu. Namun banyak juga yang membantu dan memberikan binaan agar warga tidak menjadi putus asa.

Kemudian pada tahun 1974 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tepatnya pada tanggal 20 April 1974 Bupati Lampung Tengah mengeluarkan Surat

Keputusan Nomor: 8/1.K/P/Pem/1974 tentang Pengesahan Perkampungan yang berada di wilayah Reg. 38 Gn. Balak. Dengan Perkampungan Sidorejo menjadi Desa Sidorejo dan berada di dalam Wilayah Binaan Kecamatan Gunung Balak, beserta dengan 12 Desa lainnya sehubungan dengan adanya program Translok. Maka Desa Sisorejo dimasukan kedalam binaan Kecamatan Jabung, dan Desa Sidorejo telah terdaftar dalam Departemen Dalam Negeri dengan Nomor Kode Desa : 18.02.09.2038. kemudian dengan perkembangan waktu, Pemerintah melakukan pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebagai wujud pemerataan pembangunan dengan dilahirkannya Kabupaten Lampung Timur dan Kecamatan Jabung di mekarkan menjadi Kecamatan Sekampung Udik, maka Desa Sidorejo diserahkan pembinaanya kepada Kecamatan Sekampung Udik hingga saat ini. Desa Sidorejo terdaftar sebagai Desa Devinitif pada tahun 1998 dengan Nomor Kode Desa: 18.07.12.2011 sampai sekarang.

Desa Sidorejo memiliki luas wilayah mencapai 142.997 Ha, terdiri dari lahan basah, lahan kering dan pemukiman. Berpenduduk kurang lebih 11.401 jiwa yang tersebar dalam sembilan dusun, hal ini merupakan potensi sumberdaya manusia yang cukup potensial disamping potensi sumber daya alamnya.

Masyarakat Sidorejo terdiri dari dua suku yaitu, suku bali dan jawa yang terbagi dalam beberapa dusun. Masyarakat Sidorejo memiliki kultur agama yang heterogen, dimana terdapat tempat-tempat ibadah setiap agama yang berbeda. Mayoritas masyarakat Desa Sidorejo berprofesi sebagai petani dan pedagang.

Dari berdirinya Desa Sidorejo hingga saat ini, telah dipimpin oleh Kepala Desa diantaranya:

1. Letda Suherman : Tahun 1974 – 1976
2. Sadiyo : Tahun 1976 – 1980
3. M. Wandar : Tahun 1980 – 1982
4. Mugiharjo : Tahun 1982 – 1985
5. Sadiyo : Tahun 1985 – 1987
6. Santoso Arifin : Tahun 1987 – 1989
7. Qosdu Syai'in : Tahun 1989
8. Amri Wasin : Tahun 1989 – 1998
9. Supanto : Tahun 1998 – 2000
10. Nengah Suparta : Tahun 2000 – 2003
11. Sukirno : Tahun 2003 – 2005
12. I. Gede Sudiasa : Tahun 2005 – 2007
13. Pujiono : Tahun 2007 – 2013
14. Pujiono : Tahun 2013 - Sekarang

## **B. Kondisi Geografis Desa Sidorejo**

Berikut dibawah ini merupakan kondisi Geografis Desa Sidorejo

### a) Kondisi Geografis

- 1) Ketinggian Tanah : 2500 mdpl
- 2) Curah Hujan : 1.925 mm/th
- 3) Fotografi : Dataran Rendah
- 4) Suhu Udara : 28 - 30° C

b) Batas Wilayah

Batas-batas wilayah Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut;

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Eks Hutan Lindung Gunung Balak.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Brawijaya dan Desa Bukit Raya.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pugung Raharjo dan Desa Bauh Gunung Sari
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bandar Agung.

c) Luas Wilayah

- 1) Perumahan : 792 Ha
- 2) Perkebunan Rakyat : 196 Ha
- 3) Jalan : 58 Km
- 4) Rawa : 27 Ha
- 5) Kuburan : 2,5 Ha
- 6) Sekolah : 3 Ha
- 7) Lapangan : 1 Ha

d) Orbitas (Pusat Pemerintahan Desa)

- 1) Ke kecamatan : 7 Km
- 2) Ke Kabupaten/Kota : 56 Km
- 3) Ke Ibu Kota Provinsi : 60 Km
- 4) Ke pelayanan sosial : 56 Km

## e) Kependudukan

Jumlah penduduk menurut:

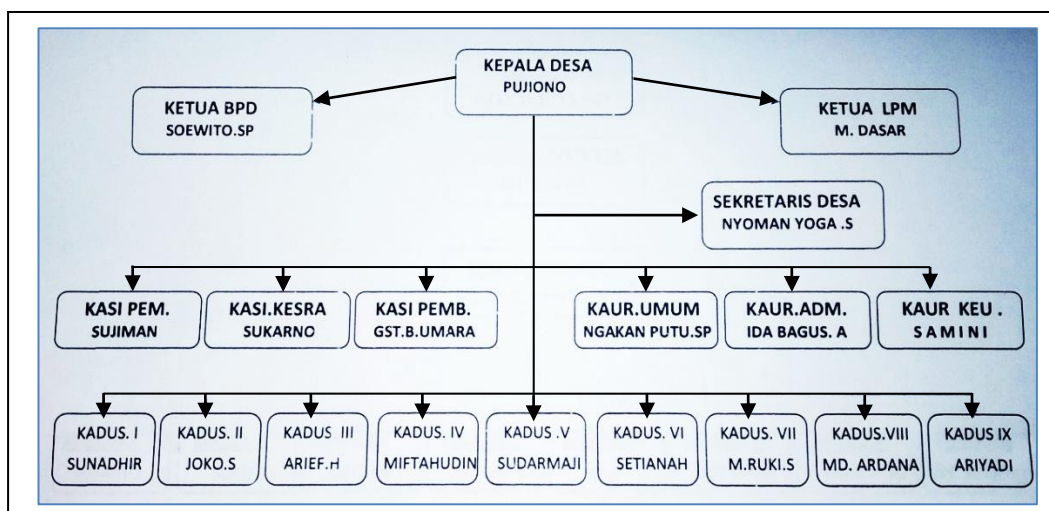
- 1) Laki-laki : 5.985 Orang
- 2) Perempuan : 6.173 Orang
- 3) Kepala Keluarga : 3.317

Menurut Agama:

- 1) Islam : 9.735 Orang
- 2) Kristen : 139 Orang
- 3) Katholik : 62 Orang
- 4) Hindu : 2.159 Orang
- 5) Budha : 63 Orang

### C. Struktur Pemerintahan Desa Sidorejo

Dibawah ini adalah struktur pemerintahan Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.



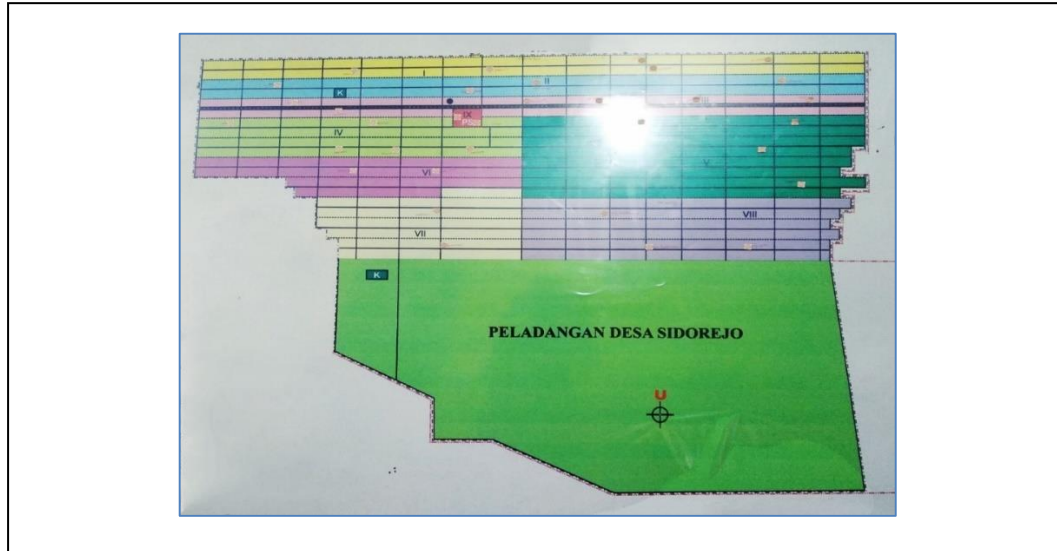
Gambar 3. Struktur Pemerintahan Desa Sidorejo.

Sumber: Profil Desa Sidorejo (2015)



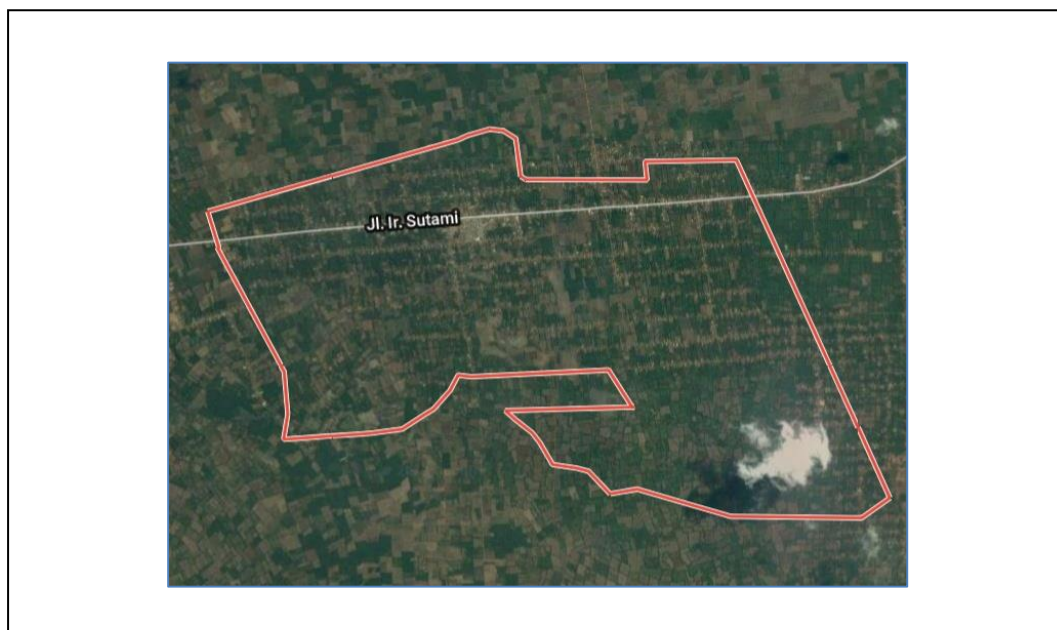
#### D. Peta Desa Sidorejo

Dibawah ini adalah Peta Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.



Gambar 4. Peta Desa Sidorejo.

Sumber: Profil desa (2015)



Gambar 5. Peta Desa Sidorejo.

Sumber: Google Maps (2018).

### **E. Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra**

Perlu diketahui bahwa, masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur telah mendapat bantuan beras sejak program ini bernama Raskin/Rastra dengan bertransformasinya program tersebut menjadi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) tidak menyebabkan perubahan yang signifikan, hanya saja terdapat perubahan jumlah penerima bantuan tersebut. Pada saat program ini bernama Raskin/Rastra, jumlah masyarakat penerima bantuan berjumlah 652 KK dengan jumlah beras 15 Kg/Sak namun setelah berubah menjadi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) jumlah penerimanya menjadi 551 KK dengan jumlah beras 10 Kg/sak, perlu diketahui bahwa setiap KK mendapat bantuan satu sak beras setiap bulan. Sehingga pada bagian ini penulis menampilkan data hasil dari pengolahan data yang di peroleh dari dokumen resmi desa, berupa daftar nama-nama kepala keluarga yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) yang terbagi dalam 9 Dusun. Dengan adanya data tersebut penulis berharap dapat memberikan informasi lebih kepada pembaca dan dengan adanya data ini penulis dapat memperkaya hasil temuan dalam proses penelitian. Berikut daftar nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) di Desa Sidorejo:

Tabel 3. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun I.

No	Nama	No	Nama
1	Wagimin	43	Slamet
2	Mustamar	44	Jumadi
3	Paijo	45	Suharto
4	Katimin	46	Sunyono
5	Marjan	47	Suhartono
6	Jumariyah	48	Yohanes
7	Iskandar	49	Tumini
8	Purwono	50	Slamet
9	Edi winarno	51	Supriyanto
10	Pomidi	52	Masiin
11	Ponisah	53	Mutiah
12	Kurdi	54	Purwanto
13	Martono	55	Munarjo
14	Sarijan	56	Suradi
15	Supriyanto	57	Sutrisno
16	Arifin	58	Susanto
17	Kusno	59	Edi sutrisno
18	Romlan	60	Heru jatmiko
19	Kawito	61	Tumpuk
20	Sodik	62	Ketut mewen
21	Dwi	63	Nur hariyanto
22	Legio	64	Ali tariyat
23	Subari	65	Imam sukemi
24	Slamet	66	Muslim
25	Hari palal	67	Tani sukirman
26	Muladi	68	Supeno
27	Suhono	69	Sukarjono
28	Taryanto	70	Kadiyo
29	Sugiono	71	Mujani
30	Mulyono	72	Made sulista
31	Slamet	73	Eko s
32	Mulani	74	Musolek
33	Suparman	75	Rohmanto
34	Wartini	76	Slamet
35	Karyanto	77	Mujiono
36	Poniyem	78	Sugito
37	Kristiana	79	Siswoyo
38	Riyanto	80	Suharno
39	Sunaryo	81	Sugeng
40	Suranto	82	Surajin
41	Rebo	83	Sucipto
42	Sulemiyanto	84	Subari

No	Nama	No	Nama
85	Maseno	96	Slamet
86	Samirun	97	Katijan
87	Wakimin	99	Jumadi
88	Pardi	100	Gusti ngurah
89	Supanti	101	Malik
90	Sujarno	102	Suwarno
91	Marni	103	Saimo
92	Surmi	104	Poniyem
93	Suripto	105	Bejo
94	Nurhayati	106	Jaman
95	Hamzah	107	Zaini

Sumber: Dokumen resmi desa.

Tabel 4. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun II.

No	Nama	No	Nama
1	Hakim turmudi	28	Sugito
2	Nengah tirte	29	Nurhadi
3	Nengah duduk	30	Purwanto
4	Al amin	31	Ardianto
5	Sujarno	32	Badarudin
6	Pairan	33	Sukodono
7	Semo	34	Bidun martoni
8	Bonirin	35	Sanusi
9	Sonidin	36	Nuryahman
10	Tohari	37	Suranto
11	Sarjono	38	Jumirin
12	Hermanto	39	Nursalim
13	Kuswoyo	40	Bibit
14	Ahmad firmanto	41	Suprpto
15	Lasimin	42	Nurade efendi
16	Sumanto	43	Tobari
17	Daryono	44	Sidik
18	Satino	45	Indarto
19	Suprpto	46	Sukadi
20	Wagino	47	Ahmad sobirin
21	Satimin	48	Muhail
22	Daman	49	Jamin
23	Suwandi	50	Sungep
24	Mesno	51	Sabarudin
25	Pujiono	52	Sardi
26	Saiful wahid	53	Sodikun
27	Mariyah	54	Suyut orlandi

No	Nama	No	Nama
55	Mukalam	68	Satibi
56	Maryadi	69	Khalel
57	Tono	70	Suprpto
58	Muralim	71	Eko wahyudi
59	Hadi suwito	72	Son haji
60	Sugeng raharjo		
61	Karinem		
62	Ali nasikin		
63	Maduni		
64	Ngadinem		
65	Casan		
66	Riyanto		
67	Sabar		

Sumber: Dokumen resmi desa.

Tabel 5. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun III.

No	Nama	No	Nama
1	Sumarso	26	Joko prasetyo
2	Jumadi	27	Mahfud sodiq
3	Tami	28	Lakun
4	Suyanto	29	Nyoman suwiji
5	Supanji	30	Sarimin
6	Sunyoto	31	Timo
7	Wayan subagia	32	Muhamad subhan
8	Widodo	33	Muhamad tamyis
9	Abdul basit	34	Rian hariono
10	Muhsinin	35	Muhamad bahrudin
11	Samsuri	36	Kasiono
12	Siam	37	Harun
13	Wayan lusin	38	Romelan
14	Siswanto	39	Wagimin
15	Suyono	40	Samsudin
16	Mustamar	41	Ardi wardana
17	Ponidi	42	Nengah ruje
18	Rohadi	43	Supriyanto
19	Heldani	44	Nyoman kuasa
20	Usman	45	Paiman
21	Boiman	46	Karyadi
22	Slamet	47	Wakino
23	Karni	48	Warsito
24	Kurdi	49	Karni
25	Edi beni		

Sumber: Dokumen resmi desa.

Tabel 6. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun IV.

No	Nama	No	Nama
1	Ketut tawe	40	Harsoyo
2	Khoirudin	41	Panrate
3	M ma'un	42	Nyoman ladre
4	Mustofa	43	Surati
5	Warsono	44	Sinem
6	Damiyem	45	Bisri
7	Paridi	46	Mariman
8	Paimin	47	Poniran
9	Wayan merte	48	Katiman
10	Suwandi	49	Tarmoni
11	Jarkoni	50	Saiman
12	Supiyanto	51	Wayan slamet
13	Lanjar	52	Wakidi
14	Sanusi	53	Jasmin
15	Suryanto	54	Jamin
16	Rohani	55	Jamprah
17	Saidi	56	Sarman
18	Salamah	57	Sarnoto
19	Sumandri	58	Suntoro
20	Dasmani	59	Slamet
21	Iwan setiawan	60	Siti fatimah
22	Sumanto	61	Sarjuni
23	Jamil	62	M Zain
24	Ruslan	63	Sugiyanto
25	Warni	64	Mariyono
26	Riyanto	65	M Zainal abidin
27	Slamet	66	Tasman
28	Solikin	67	Saifullah
29	Mislam	68	Hari kuswanto
30	Suprayitno	69	Rusmanto
31	Satinah	70	Kasiatun
32	Ketut sudiarte	71	Tarmedi
33	Made yase	72	Pujiono
34	Pairin	73	Kasman
35	Muhid	74	Karti
36	Darwan	75	Sigit wahyudi
37	Muhalim	76	Amiroso
38	Suyadi	77	Sulton
39	Supadi	78	Eni timin

No	Nama	No	Nama
79	Hasuri	97	Budiyono
80	Sujiono	98	Misri
81	Naim	99	Petrus kriswanto
82	Imam safei	100	Katinem
83	Maulana muslim	101	Suprayitno
84	Basri	102	Supriyanto
85	Musrifah	103	Wayan slamet
86	Wayan sudiarte	104	Wayan sume
87	Sutarjono	105	Kriswanto
88	Mesno	106	Bagiyo
89	Prawito	107	Mulyo
90	Misbahudin	108	Sugito
91	Tumilan	109	Sihati
92	Japar	110	Riyadi
93	Khoirudin	111	Winarso
94	Ketut sudiarte		
95	Sariyun		
96	Sumari		

Sumber: Dokumen resmi desa.

Tabel 7. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun V.

No	Nama	No	Nama
1	Bakri	21	Tumiran
2	Ali mahfud	22	M Yusuf
3	Suranto	23	Sukirman
4	Sukarti	24	Supiyo
5	Marlan	25	Akip mashuri
6	Jumali	26	Jaenuri
7	Muslihan	27	Agus supriyanto
8	Sukirno	28	Sugito
9	Darmo	29	Abdul munir
10	Bairin	30	Adi suwanto
11	Ali mustar	31	Hadi purnomo
12	Suprihanto	32	Ali ahmad
13	Gunawan	33	Slamet
14	Samsul	34	Karmu
15	Samsudin	35	Sumanto
16	Dariyanto	36	Sudarmanto
17	Budiono	37	Bedor
18	Maulana	38	Eko harianto
19	Hardiwan	39	Sabrowi
20	Sumaji	40	Suratman

No	Nama	No	Nama
41	Agus budi	49	Joko
42	Monah	50	Kariono
43	Sabri	51	Kawet
44	Rubadi	52	Basori
45	Alfian	53	Eko s
46	Nuri mustofa	54	Mulyani
47	Bambang	55	Ponidi
48	Sugito		

Sumber: Dokumen resmi desa.

Tabel 8. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun VI

No	Nama	No	Nama
1	Imam hardiman	21	Nyoman gunawan
2	Emen hidayat	22	Suparto
3	Margono	23	Tarmuji
4	Bejo	24	Budiono
5	Umi khoiriah	25	Mujiono
6	I nengah suice	26	Misran
7	Supardi	27	Kasiatun
8	Supriyadi	28	Misni
9	I negah sujana	29	Sumilah
10	Sikam	30	Slamet
11	Ndinem	31	Heri kriswanto
12	Hariyono	32	Gunawan
13	Maryam	33	Mulyadi
14	Martinem	34	Marsidi
15	Kamisem	35	Wajib
16	Suprpto	36	Bondro
17	Wayan ernawati	37	Sanyoto
18	Basrodin	38	Tumilan
19	Sadam	39	Miswono aris
20	Karjiman	40	Suroto

Sumber: Dokumen resmi desa.



Tabel 9. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun VII.

No	Nama	No	Nama
1	Sirat	18	Zaini
2	Wayan oke	19	Suwarno
3	Sabar	20	Parno sarif hidayat
4	Sulistiyah	21	Muhiman
5	Wayan dumur	22	Sarno
6	Darmuji	23	Abdul muqit
7	Triono	24	Rusmiyadi
8	Nengah udaye	25	Nanang kosim
9	Gede darmadi	26	Sutinah
10	Pardi	27	Sumitun
11	Sutrisno	28	Ketut muriase
12	M Hamdani	29	Bejo pramono
13	Marsudi	30	Sunarso
14	Karsono	31	Komang name
15	Ponidi	32	Kaswan
16	Jaman	33	Toni
17	Soleh arifin	34	Toeran

Sumber: Dokumen resmi desa.

Tabel 10. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun VIII.

No	Nama	No	Nama
1	Ketut Sukarye	18	Ketut sunandar
2	Putu sudiarte	19	Nyoman yase umadi
3	Wayan sudarminte	20	Ketut sukarno
4	Wayan waneng	21	Ketut balik
5	Made griye	22	Joe sentono
6	Purwadi	23	Sureno
7	Made konten	24	Made ngurah
8	Wayan dirge	25	Sutarno
9	Wayan sutame	26	Wayan susanta
10	Nyoman sugite	27	Nyoman adi parwanto
11	Puji	28	Nyoman sukeh
12	Nuril huda	29	Wayan susile
13	Muhajir	30	Pan suari
14	Hasan basri	31	Ketut agus suyase
15	Ishak	32	Wayan lebe
16	Ketut minte	33	Nengah sunarbawa
17	Nyoman suryadi	34	Ketut subagia

No	Nama	No	Nama
35	Samsul bahri	53	Wayan suice
36	Jamisah	54	Nyoman duana
37	Masruri	55	Nengah wardani
38	Ahmad umi abdilah	56	Putu sukadi
39	Rokayah	57	Ngakan putu widiasa
40	Fatimah	58	Made kartono
41	Amar maruf	59	Ketut suardike
42	Bahrudin	60	Wayan labe
43	Sunarno	61	Wayan suker
44	Kadek pasek	62	Nyoman lanus
45	Wayan pasek	63	Gusti aji karang
46	Wayan agustina	64	Ketut parno
47	Ketut suwardane	65	Wayan sudarma
48	Nyoman sudiarne	66	Nyoman iwan
49	Pan jiwe	67	Wayan darmawan
50	Nyoman karsane	68	Made suarsane
51	Nyoman astawan	69	Nyoman bomen
52	Ketut damana	70	Made ngurah

Sumber: Dokumen resmi desa.

Tabel 11. Daftar Nama KPM Bansos Rastra Dusun IX.

No	Nama	No	Nama
1	Ahmad soderi	7	Ekawati
2	Nasirudin	8	Suheri
3	Sahri irawan	9	Sugeng hadi mulyo
4	Imam nahrowi	10	Misna
5	Toman	11	Gunawan
6	Gunari	12	Mulyono

Sumber: Dokumen resmi desa.

## **F. Kaitan Desa Sidorejo dengan Permasalahan Beban Biaya pada Bansos Rastra**

Bansos Rastra merupakan bantuan dari pemerintah berupa beras sebanyak 10 kg tanpa adanya biaya tebusan yang disalurkan setiap bulan kepada masyarakat miskin dengan kualitas premium. Program Bansos Rastra merupakan upaya pemerintah meringankan beban dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pokok pangan berupa beras, yang menjadi hak dasar masyarakat.

Lebih lanjut, hingga saat ini masih terdapat masyarakat Desa Sidorejo yang tergolong dalam penduduk miskin, 551 kk mendapat bantuan dari pemerintah yang sebelumnya jumlah penerima bantuan mencapai 651 kk. Salah satu program dari pemerintah yang di dapatkan oleh masyarakat miskin di Desa Sidorejo adalah Bantuan Sosial Beras Sejahtera. Maka pemerintah Desa Sidorejo pada setiap bulannya bertanggung jawab atas penyaluran dari Titik Bagi (TB) ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra). Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Bansos Rastra tahun 2018, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak menanggung beban biaya apapun dalam proses distribusi Bansos Rastra.

Namun kenyataan di lapangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, harus menanggung biaya tebusan dalam proses distribusi, yang ditarik oleh petugas pendistribusi di Titik Bagi (TB). Hal ini tentu melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pihak-pihak terkait, sehingga tindakan

penarikan / pembebanan biaya pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) adalah suatu tindak pidana pungutan liar, berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Peristiwa tersebut masih terjadi hingga saat ini, hal ini tentu dapat menghambat usaha pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencari tahu penyebab munculnya beban biaya yang harus ditanggung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) khususnya di Desa Sidorejo. Dengan adanya usaha untuk mencari tahu penyebab munculnya beban biaya yang harus ditanggung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), diharapkan dapat ditemukannya solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, mampu menjawab pertanyaan penulis tentang, apa penyebab munculnya beban biaya yang harus ditanggung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur diantaranya:

1. Tidak adanya anggaran dari pemerintah kabupaten dalam proses distribusi di Titik Bagi (TB) ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Tidak ada respon atau solusi dari pemerintah desa untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga petugas pelaksana distribusi Bantuan Sosial Beras Sejahtera ( Bansos Rastra ) di Titik Bagi (TB) harus membebankan biaya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai ongkos distribusi.

### **B. SARAN**

1. Fenomena munculnya beban biaya yang harus ditanggung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) merupakan hasil dari ketimpangan kebijakan antar struktur pemerintahan yang

ada saat ini. Sebaiknya dilakukan kembali pengkajian tentang program-program kebijak yang berhubungan dengan masyarakat secara mendalam, dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat terendah, agar kebijakan tersebut matang dan tidak menimbulkan permasalahan baru di dalam masyarakat.

2. Pemerintah desa harus proaktif dalam menanggapi berbagai masalah yang muncul akibat dari kebijak-kebijakan pemerintah di atasnya, karena pemerintahan desa bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga apabila pemerintah desa aktif dalam melaporkan berbagai masalah yang timbul akibat kebijakan, maka dapat menjadi koreksi bagi pembuat kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Afrizal. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bawengan, GW. (1974). *Masalah kejahatan dengan sebab dan akibat*. Jakarta. Pradya Paramita.
- Haryanto, S. (2016). *Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Haryanto, S. (2016). *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Iskandar. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Prees.
- Nurbuko, Cholid. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutherland, Edwin H. (1969). *Azas-azas kriminologi* ( Momon Kartasaputra, Penerjemah.). Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

### Sumber Jurnal:

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2017*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2011*. Jakarta.
- Hikmat, H. (2017, November). *Pengelolaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan yang Lebih Berkualitas*. Disampaikan pada Seminar Budget Day, Jakarta.
- Inter-Agency and Expert Group on Indikator MDG. (2015). *The Millenium Development Goals Report*. New York.

Junaidi, M. S. (2017). Komparasi kepuasan penerima kartu bantuan pangan non tunai dan penerima rastra di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 15 (2), 273-288.

Romli,O. (2017). Implementasi program beras miskin (raskin) di Desa Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang. *Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*. 10 (06), 87-97.

Ramadhani, W. (2017). Penegakan hukum dalam menaggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal hukum samudra keadilan*, 2017, 12.2: 263-276.

Sugiarti, Y. (2014). Kemiskinan sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindakan Kejahatan. *Jendela Hukum*, 1 (1).

#### **Sumber Berita:**

Afrianto, Dedy. (2016, Oktober 26). Efektivitas raskin rendah, pemerintah lakukan evaluasi total di 2017. *Okezone.com*.

Adi. (2018, Januari 30).Bansos rastra diduga kuat dijadikan ajang pungli. *Kediri.memo.co.id*.

DH. (2018, Februari 8). Oknum kades diduga terima pungli rastra. *Kabar-banten.com*

Donnal, Andri. (2018, Juli 16). BPS: Maret 2018, Persentase kemiskinan Indonesia terendah sejak 1999. *Kompas.com*.

Denny. (2018, Agustus 9). Diduga pungli Bansos Rastra Desa Raman Aji Lampung Timur. *News.ilmci.com*.

Farhan, Farida. (2018, Januari 29). Sejumlah kepala desa tolak penyaluran rastra karena berpotensi salah sasaran. *Kompas.com*.

Iwan. (2018, Februari 25). Rastra menimbulkan masalah dalam desa. *Segerindo.com*

Natalia, Desca Lidya. (2018, Juli 25). Presiden soroti tiga program pengentasan kemiskinan. *Antaraneews.com*

Tim. (2018, April 20). Bansos rastra kabupaten sambas ditarik biaya. *HarianKriminal.online*.